

## Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Ketepatan Sasaran BLT Desa

Annisa Dina Maisarah HSB<sup>1\*</sup>, Ananda Fazhira<sup>2</sup>, Nandita Olivia Natasya<sup>3</sup>, Putri Kemala Dewi Lubis<sup>4</sup>, Nela Permata Sari Lubis<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

E-mail: [annisadinamaisarah@gmail.com](mailto:annisadinamaisarah@gmail.com)

\*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5826>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 19 Mar 2026

Revised: 25 Mar 2026

Accepted: 31 Mar 2026

#### Kata Kunci:

Penganggaran Berbasis Kinerja; Ketepatan Sasaran; Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa; Pengelolaan Anggaran Desa; Kesejahteraan Masyarakat.

#### Keywords:

Performance-Based Budgeting; Targeting Accuracy; Village Direct Cash Assistance (BLT); Village Budget Management; Community Welfare.



### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap ketepatan sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20228. Penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem pengelolaan anggaran yang menekankan pada keterkaitan antara alokasi dana dan hasil yang ingin dicapai. Dalam konteks penyaluran BLT Desa, ketepatan sasaran menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas program bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap ketepatan sasaran BLT Desa, yang ditandai dengan adanya pendataan penerima yang lebih terstruktur, mekanisme pengawasan yang jelas, serta evaluasi berdasarkan manfaat yang dirasakan Masyarakat. Dengan demikian, semakin baik penerapan penganggaran berbasis kinerja, maka semakin tepat pula penyaluran BLT kepada Masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran desa.

*This study aims to analyze the effect of performance-based budgeting on the targeting accuracy of Village Direct Cash Assistance (BLT Desa) in Binjai Subdistrict, Medan Denai District, Medan City, North Sumatra, Postal Code 20228. Performance-based budgeting is a budgeting system that emphasizes the linkage between budget allocation and achieved outcomes. In the context of BLT Desa distribution, targeting accuracy is a crucial indicator in assessing the effectiveness of social assistance programs. This research employs a descriptive method with a qualitative approach through data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of performance-based budgeting has a positive influence on the targeting accuracy of BLT Desa, as reflected in more structured beneficiary data collection, clear supervision mechanisms, and evaluation based on the benefits perceived by the community. Therefore, the better the implementation of performance-based budgeting, the more accurate the distribution of BLT to eligible beneficiaries. This study is expected to contribute to improving transparency, accountability, and effectiveness in village budget management.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Annisa Dina Maisarah HSB, et al. (2026), Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Ketepatan Sasaran BLT Desa, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5826>

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Pemerintah dituntut untuk mampu mengalokasikan anggaran secara efektif agar setiap program yang di rencanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi

masyarakat. Penggunaan anggaran tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi, tetapi juga menyangkut hasil yang dicapai dari setiap kebijakan. Dalam konteks Pembangunan daerah, pengelolaan anggaran menjadi instrument penting dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu, system penganggaran harus dirancang secara terukur dan sistematis. Dengan pengelolaan yang baik, anggaran dapat menjadi alat untuk mendorong pemerataan dan keadilan social.

Dalam perkembangannya, system penganggaran mengalami perubahan dari pendekatan tradisional menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada hasil. System ini menekankan bahwa setiap dana yang dialokasikan harus memiliki tujuan yang jelas dan indicator keberhasilan yang terukur. Keberhasilan suatu program tidak lagi hanya dinilai dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas penggunaan anggaran public. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi Masyarakat. Perubahan paradigma ini menjadi bagian penting dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu program yang dibiayain melalui anggaran pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai Desa. Program ini dirancang untuk membantu Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga yang dinilai layak berdasarkan kriteria tertentu. Kehadiran program ini diharapkan dapat menjaga stabilitas social dan meningkatkan daya beli Masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, bantuan social menjadi instrument penting dalam menjaga kesejahteraan rumah tangga miskin. Oleh sebab itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat dan terarah.

Meskipun memiliki tujuan yang baik, pelaksanaan bantuan social sering menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Sdalah satu persoalan utama ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Masih ditemukan kasus Dimana bantuan diterima oleh Masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Disisi lain, terdapat Masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata secara akurat. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem pendataan dan verifikasi. Jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka tujuan program akan sulit tercapai secara optimal.

Ketepatan sasaran menjadi indicator penting dalam menilai efektivitas suatu program bantuan social. Bantuan yang tepat sasaran akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan penerima. Sebaliknya, ketidaktepatan sasaran dapat menimbulkan pemborosan anggaran dan kecemburuan social di Masyarakat. Keakuratan data penerima menjadi factor utama dalam menentukan keberhasilan program. Selain itu, transparansi dalam proses penetapan penerima juga sangat diperlukan. Dengan system yang terbuka dan akuntabel, kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga.

Berbagai studi menunjukkan bahwa masalah ketidaktepatan sasaran sering disebabkan oleh data yang tidak diperbarui secara berkala. Data penerima bantuan yang sudah tidak relevan dapat menyebabkan kesalahan dalam penyaluran. Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi juga memperbesar resiko terjadinya kesalahan. Pengawasan yang belum optimal turut memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan system pengelolaan yang mampu mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara menyeluruh. Dengan system yang baik, potensi kesalahan dapat diminimalkan.

Transparansi menjadi salah satu prinsip penting dalam penyaluran bantuan social. Masyarakat perlu mengetahui kriteria dan mekanisme penetapan penerima agar terjadi kesalahpahaman. Informasi yang terbuka akan membantumenciptakan rasa keadilan ditengah Masyarakat. Selain itu, partisipasi Masyarakat dalam proses verifikasi data juga dapat meningkatkan akurasi penerima. Keterlibatan Masyarakat menjadi bentuk control social terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, transparansi dan partisipasi dapat memperkuat efektivitas program.

Pelaksanaan bantuan social di Tingkat kelurahan memiliki peran strategis karna kelurahan merupakan unit pemerintah yang paling dekat dengan Masyarakat. Aparatur kelurahan memiliki akses langsung terhadap kondisi social ekonomi warga. Hal ini memungkinkan proses pendataan dilakukan secara lebih detail. Namun demikian, keterbatasan sumber daya sering menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan system yang mampu membantu aparaturnya dalam mengelola program secara lebih terstruktur. System tersebut harus mampu mengarahkan proses perencanaan hingga evaluasi secara menyeluruh.

System penganggaran yang berorientasi pada hasil diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan tersebut. System ini mendorong adanya indikator yang terukur, pemerintah dapat mengevaluasi keberhasilan program secara objektif. Evaluasi berkala memungkinkan perbaikan dilakukan secara tepat dan cepat. Selain itu, system ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas setiap penggunaan dana. Dengan demikian, kualitas penyaluran bantuan dapat terus ditingkatkan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran memiliki hubungan erat dengan keberhasilan program public. Daerah yang menerapkan system perencanaan dan evaluasi yang baik cenderung memiliki Tingkat efektivitas program yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tata Kelola anggaran yang baik dapat mendukung ketepatan sasaran bantuan. Namun, hasil penelitian di berbagai daerah masih menunjukkan variasi. Perbedaan kondisi social dan kapasitas aparatur menjadi factor yang mempengaruhi hasil tersebut. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut pada Tingkat kelurahan menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian terdahulu juga menekankan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan dan indikator kerja yang digunakan. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa “penganggaran berbasis kinerja merupakan system penganggaran yang berorientasi pada output dan outcome untuk meningkatkan akuntabilitas public”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya dilihat dari penggunaan dana, tetapi juga dari hasil yang dicapai. Dalam konteks bantuan social, indikator keberhasilan harus mampu menggambarkan Tingkat ketepatan sasaran penerima. Jika indikator dirancang dengan baik, maka proses evaluasi dapat dilakukan secara objektif. Dengan demikian, system penganggaran yang terukur berpotensi meningkatkan kualitas penyaluran bantuan.

Selain itu, konsep tata Kelola pemerintahan yang baik juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran public. Menurut Mahmudi (2016), “akuntabilitas public merupakan kewajiban pihak pengelola sumber daya public untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Masyarakat”. Dalam pelaksanaan bantuan social, akuntabilitas diwujudkan melalui laporan penggunaan dana serta kejelasan data penerima bantuan. Transparansi yang baik akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan. Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan program. Oleh karena itu, system pengelolaan anggaran harus mampu mendukung prinsip-prinsip tersebut.

Ketepatan sasaran bantuan social juga berkaitan erat dengan kualitas data yang digunakan dalam proses pendataan. Data yang akurat dan mutakhir akan mempermudah proses verifikasi penerima bantuan. Sebaliknya, data yang tidak diperbarui dapat menyebabkan kesalahan dalam penetapan penerima. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo (2017) yang menyatakan bahwa “keberhasilan implementasi kebijakan public sangat ditentukan oleh ketepatan informasi dan koordinasi antar pelaksana”. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan yang dirancang dengan baik pun dapat mengalami kegagalan di lapangan. Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan bantuan sosial sering dipengaruhi oleh kapasitas aparatur pemerintah di Tingkat local. Aparatur yang memiliki pemahaman baik mengenai mekanisme pengelolaan anggaran cenderung mampu menjalankan program dengan lebih efektif. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya manusia dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Oleh sebab itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program bantuan social. System penganggaran yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan kombinasi keduanya, kualitas pelayanan publik dapat meningkat secara signifikan.

Partisipasi Masyarakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. Keterlibatan Masyarakat dalam proses musyawarah dan verifikasi data dapat membantu memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto (2015) yang menyatakan bahwa “partisipasi Masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.” Melalui partisipasi aktif, Masyarakat dapat memberikan masukan terkait kondisi riil di lapangan. Selain itu, partisipasi juga

berfungsi sebagai bentuk control social terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan Masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.

Evaluasi program secara berkala merupakan Langkah penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas bantuan social. Evaluasi memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan secara tepat waktu. Tanpa evaluasi yang terstruktur, program berisiko berjalan tanpa arah yang jelas. Proses evaluasi harus didasarkan pada indikator yang terukur dan relevan dengan tujuan program. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar dalam perencanaan program berikutnya. Dengan siklus evaluasi yang berkelanjutan, kualitas pengelolaan anggaran dapat terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, kajian ini berupaya menjelaskan pentingnya sistem pengelolaan anggaran yang terstruktur dalam mendukung ketepatan sasaran bantuan sosial. Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan anggaran sektor publik yang baik harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas agar program pemerintah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Ketepatan sasaran bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut aspek keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Amartya Sen (1999), kebijakan sosial yang tepat sasaran merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperluas kesempatan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Program bantuan yang tepat sasaran akan memberikan dampak positif yang signifikan. Sebaliknya, ketidaktepatan sasaran dapat mengurangi efektivitas kebijakan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan anggaran menjadi kebutuhan yang mendesak. Dengan sistem yang baik, program bantuan sosial dapat berjalan secara optimal.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan pengelolaan anggaran di tingkat kelurahan. Temuan penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi kajian selanjutnya yang membahas topik serupa. Upaya peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, program bantuan sosial dapat benar-benar mencapai tujuan utamanya. Kesejahteraan Masyarakat yang membutuhkan menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terjadi di masyarakat. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara langsung dari informan berdasarkan pengalaman serta kondisi nyata di lapangan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk angka statistik, melainkan dalam bentuk uraian yang menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang menerima program Bantuan Langsung Tunai secara rutin. Selain itu, masyarakat di wilayah tersebut memiliki latar belakang sosial ekonomi yang beragam sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dampak bantuan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp500.000 per bulan yang menjadi informan dalam penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, arsip kelurahan, serta peraturan yang berkaitan dengan program bantuan sosial. Penggunaan kedua sumber data tersebut bertujuan untuk memperkuat keabsahan dan kelengkapan informasi dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada penerima bantuan untuk memperoleh informasi mengenai proses penerimaan bantuan, manfaat yang dirasakan, serta kendala yang dihadapi oleh

masyarakat. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat serta proses penyaluran bantuan di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa arsip, foto kegiatan, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif sehingga informasi yang diperoleh lebih mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola serta temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan kembali kepada informan guna memastikan kebenaran informasi yang diperoleh. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Mekanisme Pendataan Penerima Bantuan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendataan penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme administrative yang melibatkan perangkat lingkungan dan pihak kelurahan. Berdasarkan keterangan informan, terdapat tahapan survei langsung ke rumah untuk memastikan kondisi sosial ekonomi calon penerima. Proses ini menunjukkan adanya upaya verifikasi sebelum bantuan diberikan. Secara umum, mekanisme tersebut telah mencerminkan prosedur yang terstruktur. Namun, terdapat perbedaan jalur masuk dalam proses pendataan, Dimana Sebagian informan di data langsung dan sebagian lainnya melapor secara mandiri. Perbedaan ini menunjukkan bahwa akses terdapat informasi masih memengaruhi peluang seseorang untuk terdaftar.

### ***Kesesuaian Mekanisme Dengan Teori Implementasi Kebijakan***

Jika dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan public, mekanisme tersebut telah memiliki unsur struktur birokrasi dan prosedur administratif. Teori implementasi menjelaskan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kejelasan mekanisme pelaksanaan. Dalam praktiknya, proses pendataan sudah dilakukan melalui tahapan yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara teori dan praktik pada aspek procedural. Namun, perbedaan akses informasi menunjukkan bahwa unsur komunikasi belum berjalan secara maksimal. Dengan demikian, secara struktur sudah sesuai teori, tetapi secara komunikasi masih perlu diperbaiki.

### ***Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan***

Dari sisi ketepatan sasaran, dua informan menilai bahwa bantuan sudah diberikan kepada kelompok yang memang membutuhkan, seperti lansia dan warga berpenghasilan rendah. Penilaian ini menunjukkan bahwa secara umum program telah menysasar kelompok rentan. Akan tetapi, satu informan menyatakan bahwa masih terdapat warga yang relative mampu namun tetap menerima bantuan. Temuan ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian data dengan kondisi riil di lapangan. Ketidaktepatan ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di Masyarakat. Oleh karena itu, akurasi data menjadi factor yang sangat penting.

Dalam teori kebijakan public, ketepatan sasaran merupakan indikator efektivitas program. Suatu kebijakan dinilai efektif apabila mampu menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Berdasarkan temuan penelitian, program ini sudah cukup efektif, tetapi belum sepenuhnya optimal. Artinya terdapat kesesuaian Sebagian antara teori dan praktik. Ketidaktepatan dalam pendataan menunjukkan bahwa implementasi belum sepenuhnya memenuhi standar ideal efektivitas. Dengan demikian, diperlukan evaluasi dan pembaruan data secara berkala.

### ***Manfaat Bantuan Sosial***

Selanjutnya, dari aspek manfaat bantuan, seluruh informan menyatakan bahwa bantuan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan digunakan untuk membeli bahan pokok, membayar listrik, dan membantu kebutuhan pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. Bagi informan lansia yang tidak

memiliki penghasilan tetap, bantuan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan harian. Sementara bagi informan yang masih bekerja, bantuan berfungsi sebagai tambahan pendapatan. Dengan demikian, manfaat bantuan dirasakan secara nyata oleh penerima.

Dalam perspektif penganggaran berbasis kinerja, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi dari outcome atau hasil yang dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, bantuan telah memberikan outcome berupa keringanan beban ekonomi. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara teori penganggaran berbasis kinerja dan praktik di lapangan. Program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata. Namun demikian, evaluasi terhadap ketepatan sasaran tetap diperlukan agar outcome yang dihasilkan benar-benar optimal.

#### ***Kendala Dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan***

Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, seperti antrean panjang saat pencairan dan keterlambatan jadwal. Informan lansia mengeluhkan antrean yang cukup melelahkan. Selain itu, perubahan jadwal tanpa pemberitahuan yang jelas menimbulkan ketidakpastian. Kendala ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam penyaluran bantuan masih memiliki kelemahan. Permasalahan tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap program. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan menjadi kebutuhan yang mendesak.

#### ***Kualitas Pelayanan Dalam Perspektif Teori Pelayanan Publik***

Dalam teori pelayanan publik, kualitas pelayanan dipengaruhi oleh kecepatan, kejelasan informasi, dan kemudahan akses. Dalam praktiknya, aspek kecepatan dan kejelasan informasi belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan pelaksanaan. Secara konsep, pelayanan publik seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia. Namun kenyataannya, lansia masih harus mengantre dalam waktu lama. Dengan demikian, aspek pelayanan perlu ditingkatkan agar selaras dengan prinsip teori.

#### ***Transparansi Informasi Program***

Transparansi informasi dalam pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan. Beberapa informan menyatakan bahwa informasi mengenai jadwal pencairan sering diperoleh dari komunikasi informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penyampaian informasi belum terstruktur dengan baik. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan di masyarakat. Transparansi sangat penting untuk menjaga legitimasi kebijakan. Oleh karena itu, sistem informasi perlu diperbaiki agar lebih terbuka dan mudah diakses.

Dalam teori tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama. Transparansi mengharuskan pemerintah memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, prinsip ini belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Meskipun bantuan telah disalurkan, penyampaian informasi masih kurang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa praktik belum sepenuhnya sesuai dengan teori good governance. Upaya peningkatan transparansi menjadi langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas program.

#### ***Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program***

Dari sisi partisipasi masyarakat, proses pendataan menunjukkan adanya keterlibatan perangkat lingkungan. Namun, keterlibatan masyarakat secara luas dalam proses verifikasi belum tergambar secara jelas. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa data penerima sesuai dengan kondisi riil. Tanpa partisipasi aktif, potensi kesalahan sasaran akan lebih besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masih bersifat terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif.

Jika dibandingkan dengan teori partisipasi publik, kebijakan yang melibatkan masyarakat cenderung lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat masih dapat ditingkatkan. Artinya, terdapat ketidaksesuaian parsial antara teori dan kondisi lapangan. Partisipasi yang lebih luas dapat meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian, penguatan partisipasi menjadi rekomendasi penting.

#### ***Eektivitas Program***

Secara keseluruhan, program bantuan telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan penerima. Bantuan membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan program secara umum telah tercapai. Namun, pencapaian tersebut

belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat kendala teknis dan administratif. Evaluasi berkala menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Dengan evaluasi, kelemahan yang ada dapat segera diperbaiki.

Dari perspektif efektivitas kebijakan, program ini dapat dikategorikan cukup efektif namun belum optimal. Efektivitas terlihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Akan tetapi, ketidaktepatan sasaran dan kendala pelayanan menunjukkan adanya ruang perbaikan. Hal ini menunjukkan kesesuaian sebagian dengan teori efektivitas kebijakan. Teori menyatakan bahwa kebijakan yang efektif harus tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat nyata. Dalam praktiknya, aspek manfaat sudah terpenuhi, tetapi aspek ketepatan dan efisiensi pelayanan masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, konsistensi jadwal pencairan juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi penerima. Ketidakpastian jadwal dapat mengganggu perencanaan keuangan rumah tangga. Dalam teori manajemen publik, konsistensi pelaksanaan merupakan bagian dari profesionalisme birokrasi. Berdasarkan temuan, konsistensi ini belum sepenuhnya terjaga. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara teori manajemen publik dan praktik lapangan.

Secara normatif, program bantuan sosial dirancang untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi tersebut telah berjalan. Namun, kualitas pelaksanaan masih perlu disempurnakan agar lebih adil dan transparan. Perbaikan sistem informasi dan pembaruan data menjadi prioritas utama. Dengan langkah tersebut, efektivitas dan keadilan program dapat ditingkatkan.

Apabila seluruh aspek diperbaiki, maka program ini berpotensi menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Teori kebijakan publik menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam setiap program pemerintah. Evaluasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara tujuan dan hasil yang dicapai. Penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi masih diperlukan terutama pada aspek teknis pelaksanaan. Dengan evaluasi yang konsisten, kesenjangan antara teori dan praktik dapat diperkecil.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan telah sesuai dengan teori pada aspek manfaat dan struktur prosedural. Namun, belum sepenuhnya sesuai pada aspek komunikasi, transparansi, partisipasi, dan kualitas pelayanan. Kesesuaian yang bersifat parsial ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat lokal memerlukan penguatan kapasitas administrasi. Dengan penguatan tersebut, pelaksanaan program dapat lebih mendekati standar teoritis yang ideal. Pada akhirnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari penyaluran dana, tetapi dari kualitas tata kelola dan dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### *Hasil Wawancara*

**Tabel 1.** Hasil Wawancara

<b>Pertanyaan</b>	<b>Identitas</b>	<b>Jawaban</b>
<b>1. Bagaimana proses yang ibu alami hingga terdaftar sebagai penerima BLT sebesar Rp. 500.000 per bulan?</b>	a. Buk Raini (67 tahun-IRT)	Saya didata oleh kepala lingkungan karena memang sudah lama dikenal sebagai warga yang tidak memiliki penghasilan tetap. Petugas datang ke rumah untuk memastikan kondisi saya. Setelah menyerahkan fotokopi KTP dan KK, beberapa minggu kemudian saya diberitahu bahwa saya terdaftar sebagai penerima bantuan.
	b. Silvia Handayani (40 tahun-IRT)	Awalnya saya mengisi formulir pendataan yang dibagikan oleh pihak kelurahan. Setelah itu, ada survei singkat mengenai kondisi ekonomi keluarga saya. Tidak lama kemudian, saya menerima informasi bahwa saya termasuk dalam daftar penerima bantuan.
	c. Endang (45 tahun-ART)	Saya mengetahui adanya pendataan dari tetangga, lalu saya melapor ke kepala lingkungan. Petugas kemudian datang untuk melihat kondisi rumah dan pekerjaan saya. Sekitar satu bulan kemudian, saya menerima bantuan pertama.

<b>2. Apakah menurut ibu penyaluran tersebut sudah tepat sasaran sesuai dengan kondisi Masyarakat yang membutuhkan?</b>	a. Buk Raini (67 tahun-IRT)	Menurut saya sudah cukup tepat, karena banyak yang menerima memang sudah lanjut usia atau tidak punya pekerjaan tetap seperti saya. Bantuan ini sangat membantu warga yang memang benar-benar membutuhkan. Walaupun begitu, mungkin perlu dicek lagi agar lebih merata.
	b. Silvia Handayani (40 tahun-IRT)	Menurut saya belum sepenuhnya tepat. Masih ada beberapa orang yang kondisi ekonominya lebih baik tetapi tetap menerima bantuan. Sementara ada juga yang lebih membutuhkan namun belum terdaftar.
	c. Endang (45 tahun-ART)	Kalau dilihat secara umum sudah lumayan tepat, karena banyak penerima memang berpenghasilan rendah. Tetapi pendataan sebaiknya diperbarui secara berkala. Kondisi ekonomi orang bisa berubah sewaktu-waktu.
<b>3. Seberapa besar manfaat bantuan tersebut dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Ibu dan keluarga?</b>	a. Buk Raini (67 tahun-IRT)	Bantuan ini sangat membantu saya untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan kebutuhan dapur lainnya. Karena saya sudah tidak bekerja, uang tersebut sangat berarti untuk kebutuhan sehari-hari. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini.
	b. Silvia Handayani (40 tahun-IRT)	Bantuan ini cukup membantu untuk menambah kebutuhan belanja rumah tangga dan biaya sekolah anak. Walaupun jumlahnya tidak besar, tetapi sangat meringankan beban pengeluaran keluarga setiap bulan. Terutama saat harga kebutuhan pokok naik.
	c. Endang (45 tahun-ART)	Sebagai pekerja dengan penghasilan tidak tetap, bantuan ini sangat membantu menutupi kekurangan kebutuhan bulanan. Biasanya saya gunakan untuk membeli sembako atau membayar listrik. Walaupun belum mencukupi semua kebutuhan, tetapi tetap sangat berarti.
<b>4. Apakah selama proses penerimaan bantuan pernah mengalami kendala atau kesulitan?</b>	buk Raini, 67 tahun, Ibu Rumah Tangga	Kendala yang saya rasakan biasanya antrean saat pencairan cukup panjang. Karena usia saya sudah lanjut, kadang merasa lelah menunggu. Namun secara keseluruhan prosesnya masih bisa saya jalani.
	Silvia Handayani, 40 tahun, Ibu Rumah Tangga	Saya pernah mengalami keterlambatan pencairan. Jadwal yang diinformasikan terkadang berubah tanpa pemberitahuan yang jelas. Hal ini membuat saya harus bertanya kembali ke pihak kelurahan.
	Endang, 45 tahun, Asisten Rumah Tangga	Kesulitannya lebih pada kurangnya informasi yang jelas mengenai jadwal pencairan. Kadang informasi hanya dari mulut ke mulut. Jadi saya harus aktif mencari tahu sendiri.
<b>5. Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari pelaksanaan program bantuan ini agar lebih efektif dan adil?</b>	Ibuk Raini, 67 tahun, Ibu Rumah Tangga	Menurut saya pendataan harus sering diperbarui supaya benar-benar sesuai dengan kondisi terbaru warga. Selain itu, sebaiknya ada jalur khusus bagi lansia saat pencairan agar tidak terlalu lama antre.
	Silvia	Perlu adanya sosialisasi yang lebih jelas mengenai

---

Handayani, 40 tahun, Ibu Rumah Tangga	kriteria penerima bantuan. Jika semuanya transparan, masyarakat akan lebih memahami dan tidak terjadi kecemburuan sosial.
Endang, 45 tahun, Asisten Rumah Tangga	Menurut saya jadwal pencairan harus lebih tepat waktu dan informasinya lebih jelas. Selain itu, kalau memungkinkan jumlah bantuan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

---

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penerima bantuan BLT sebesar Rp500.000 per bulan, diketahui bahwa proses pendataan penerima bantuan dilakukan melalui beberapa tahapan. Informan pertama, Buk Raini, menjelaskan bahwa dirinya didata oleh kepala lingkungan karena telah lama dikenal sebagai warga yang tidak memiliki penghasilan tetap. Setelah itu, petugas datang ke rumah untuk memastikan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya, ia diminta menyerahkan fotokopi KTP dan KK sebagai syarat administrasi sebelum akhirnya dinyatakan terdaftar sebagai penerima bantuan.

Informan kedua, Silvia Handayani, menyampaikan bahwa proses pendataan diawali dengan pengisian formulir yang dibagikan oleh pihak kelurahan. Setelah pengisian formulir, dilakukan survei singkat terkait kondisi ekonomi keluarga. Beberapa waktu kemudian ia menerima informasi bahwa dirinya termasuk dalam daftar penerima bantuan. Sementara itu, informan ketiga, Endang, mengetahui adanya program pendataan dari tetangga dan kemudian melaporkan dirinya kepada kepala lingkungan. Setelah dilakukan pengecekan kondisi rumah dan pekerjaan oleh petugas, sekitar satu bulan kemudian ia mulai menerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pendataan penerima bantuan melibatkan peran pemerintah setempat serta proses verifikasi kondisi ekonomi masyarakat.

Terkait dengan ketepatan sasaran penyaluran bantuan, sebagian informan menilai bahwa program tersebut sudah cukup tepat sasaran. Buk Raini menyatakan bahwa banyak penerima bantuan merupakan masyarakat lanjut usia yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, ia juga menyampaikan bahwa pendataan masih perlu diperiksa kembali agar bantuan dapat lebih merata.

Berbeda dengan pendapat tersebut, Silvia Handayani menilai bahwa penyaluran bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik namun tetap menerima bantuan, sementara ada pula masyarakat yang lebih membutuhkan tetapi belum mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendataan masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam proses penerimaan bantuan, para informan juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi. Buk Raini menyebutkan bahwa antrean yang cukup panjang saat pencairan bantuan menjadi salah satu kesulitan, terutama bagi dirinya yang sudah lanjut usia. Silvia Handayani menyampaikan bahwa pernah terjadi keterlambatan pencairan bantuan karena jadwal yang berubah tanpa pemberitahuan yang jelas. Sementara itu, Endang mengungkapkan bahwa kurangnya informasi mengenai jadwal pencairan sering membuat masyarakat harus mencari informasi sendiri dari mulut ke mulut.

Selain itu, para informan juga memberikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bantuan tersebut. Buk Raini menyarankan agar pendataan masyarakat diperbarui secara berkala agar sesuai dengan kondisi ekonomi terbaru. Ia juga mengusulkan adanya jalur khusus bagi lansia saat proses pencairan bantuan. Silvia Handayani menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih jelas mengenai kriteria penerima bantuan agar masyarakat memahami proses penyaluran dan mengurangi kecemburuan sosial. Sementara itu, Endang menyarankan agar jadwal pencairan bantuan dibuat lebih tepat waktu dan informasi yang diberikan kepada masyarakat lebih jelas. Ia juga berpendapat bahwa jika memungkinkan, jumlah bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa program bantuan BLT memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan

tetap. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, seperti ketepatan sasaran penerima, keterlambatan pencairan, antrean panjang, serta kurangnya informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan, transparansi informasi, dan mekanisme penyaluran bantuan agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara terhadap tiga informan penerima bantuan langsung tunai sebesar Rp500.000 per bulan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Proses pendataan dilakukan melalui mekanisme administrasi dan survei lapangan, sehingga menunjukkan adanya upaya verifikasi sebelum penetapan penerima bantuan. Dari sisi manfaat, bantuan terbukti membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti bahan pokok, pembayaran listrik, serta biaya pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga penerima, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan pekerja berpenghasilan tidak tetap.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Masih terdapat persepsi bahwa penyaluran bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran karena adanya kemungkinan ketidaksesuaian data dengan kondisi ekonomi terkini masyarakat. Selain itu, kendala teknis seperti antrean panjang, keterlambatan pencairan, serta kurangnya informasi yang jelas menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan program sudah sesuai pada aspek manfaat dan prosedur administratif, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam hal komunikasi, transparansi, dan pelayanan.

Dengan demikian, program bantuan dapat dikategorikan cukup efektif dalam mencapai tujuannya, tetapi masih memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar lebih tepat sasaran, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih khususnya disampaikan kepada pihak Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, yang telah memberikan izin serta membantu proses pengumpulan data di lapangan. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kelancaran penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan artikel ini hingga selesai.

### **REFERENSI**

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. New York: Oxford University Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2019). *Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyaluran bantuan sosial*. Jakarta: TNP2K.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development (12th ed.)*. Boston: Pearson.

- United Nations Development Programme (UNDP). (2017). Transparency and accountability in public financial management. New York: UNDP.
- World Bank. (2017). Monitoring and evaluation for social assistance programs. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2018). Engaging citizens for better development results. Washington, DC: World Bank.
- Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahmudi. (2016). Akuntabilitas Publik: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Subarsono, A. G. (2016). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, J. (2017). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.